

STUDI PENYEBARAN GURU SMPN SE-KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Chairil Faif Pasani, Ahmad Naparin, & Sri Hartini
FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, Indonesia
e-mail: t2n_fis@yahoo.com

Abstract. One parameter of the professionalism of teachers is teachers teach according to their fields. Therefore, dissemination of subject teachers of each school should be evenly distributed. This study is aimed to describe the spread of the teachers at the Junior High School (SMP) as Hulu Sungai Selatan (HSS). This type of research is a survey. The subjects were teachers throughout the district SMP HSS. Data were collected through: questionnaires, interviews, observation and documentation. The results showed the overall number of teachers for the subjects of Religious Education and Character, Pancasila and Citizenship Education (PPKn), Indonesian, English, Mathematics, Natural Sciences (IPA), Social Sciences (IPS), and Physical Education and Health has been fulfilled, but the distribution is yet uneven.

Keywords: Spreading, Master, SMP, HSS

Abstrak. Salah satu parameter profesionalisme guru adalah guru mengajar sesuai dengan bidangnya. Oleh sebab itu, penyebaran guru mata pelajaran setiap sekolah harus merata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebaran guru-guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Jenis penelitian yang digunakan adalah survei. Subjek penelitian ini adalah guru-guru SMPN se-kabupaten HSS. Data dikumpulkan melalui: angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan jumlah guru untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan telah tercukupi, namun penyebarannya masih belum merata.

Kata Kunci: Penyebaran, Guru, SMPN, HSS

PENDAHULUAN

Profesionalisme guru kini menjadi sesuatu yang mengemuka ke ruang publik seiring dengan tuntutan akan pendidikan yang bermutu. Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Ditangan guru akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill, kematangan emosional, dan moral serta sprititual. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Keprofesionalan seorang guru tentunya berdampak pada tinggi rendahnya prestasi siswa. Seorang guru yang profesional memiliki syarat minimal: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (Rahman, M & Sofan, A: 2014).

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2011 terhadap jumlah dan kemampuan guru pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Banjarmasin menunjukkan hasil, bahwa terdapat 322 atau 30,29% dari total guru SMA berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengasuh sembilan mata pelajaran inti mengalami ketidaksesuaian kompetensi keilmuan terhadap mata pelajaran yang diasuh atau mengalami *missmatched*. Kemudian dilihat dari kemampuan guru-guru yang tidak relevan dengan kompetensi keilmuannya tersebut, berdasarkan sampel sebanyak 122 orang dari 322 orang guru yang *missmatched* ternyata 78,87% atau 95 orang tidak layak untuk mengajar mata pelajaran yang diasuhnya (Sofyan: 2011).

Kondisi yang terjadi pada guru SMAN se-kota Banjarmasin, tentunya juga bisa terjadi pada kondisi guru SMPN di Kabupaten HSS. Berdasarkan survei awal pada beberapa SMPN di Kabupaten HSS diindikasikan terdapat lebih dari 10% guru yang mengajar pada mata pelajaran tertentu yang diasuh oleh guru, tidak relevan dengan kompetensi keilmuannya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan penyebaran jumlah guru di sebagian besar sekolah menunjukkan kondisi yang tidak merata. Kondisi yang demikian perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) khususnya dalam penempatan guru baru atau mutasi agar tidak terjadi kelebihan guru di suatu SMPN dan kekurangan guru di SMPN yang lain. Hal tersebut sangat penting diperhatikan, terutama menyikapi syarat yang harus dipenuhi guru untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi guru memerlukan jumlah jam mengajar yang cukup besar yaitu 24 jam per minggu.

Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dilakukan sebuah studi komprehensif pada guru-guru SMPN se-kabupaten HSS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebaran guru-guru pada SMPN se-kabupaten HSS. Diharapkan

didapatkan data lengkap dan akurat terhadap keberadaan guru di setiap sekolah untuk dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan penempatan guru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Penelitian survei menggambarkan kondisi atau hubungan yang ada, proses yang terjadi, efek yang dirasakan atau tren yang berkembang. Penelitian survei mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Cohen, dkk: 2005).

Subjek penelitian ini adalah seluruh guru PNS yang mengajar di 25 buah SMPN se-Kabupaten HSS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan; (2) wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada Pejabat Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah, dan para guru untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; (3) angket, yaitu alat pengumpulan data dengan daftar pertanyaan melalui responden terutama yang berhubungan dengan instrumen penelitian; (4) sumber-sumber data sekunder yang terdiri dari : (a) peraturan-peraturan, (b) laporan tahunan, (c) arsip dan dokumen lainnya. Analisis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu bersifat menggambarkan fenomena-fenomena yang bersumber dari data yang dikumpulkan dan disajikan dengan teknik statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 25 SMP di kabupaten HSS menerapkan dua kurikulum, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 untuk kelas IX dan Kurikulum 2013 (K13) untuk kelas VII dan VIII. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 65

Tahun 2013 tentang Standar Proses di Sekolah Menengah, satu jam pelajaran adalah 40 menit. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi sebaran mata pelajaran dan jumlah jam per minggu dapat dilihat pada tabel 1.

Menurut Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 sebaran mata pelajaran dan jumlah jam perminggu dapat dilihat pada tabel 2.

Paparan data dan pembahasan selanjutnya hanya difokuskan pada mata pelajaran utama, yaitu (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) IPA, (7) IPS, (8) Seni Budaya, dan (9) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Berdasarkan data jumlah kelas terdapat 53 rombel (rombongan belajar) kelas VII, 61 rombel kelas VIII, dan 51 rombel kelas IX, maka jumlah jam per minggu pada sembilan mata pelajaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1. Struktur kurikulum 2006

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	32	32	32

Tabel 2. Struktur kurikulum 2013

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Perminggu		
	VII	VIII	IX
Kelompok A			
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Matematika	5	5	5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B			
1. Seni Budaya	3	3	3
2. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Perminggu	38	38	38

Tabel 3. Jumlah jam per minggu di SMPN Kabupaten HSS

No	Mata Pelajaran	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	Jumlah
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	159	183	102	444
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	159	183	102	444
3.	Bahasa Indonesia	318	366	204	888
4.	Matematika	265	305	204	774
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	265	305	204	774
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	212	244	204	660
7.	Bahasa Inggris	212	244	204	660
8.	Seni Budaya	159	183	102	444
9.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	159	183	102	444

Tabel 4. Kebutuhan dan ketersediaan guru SMPN di kabupaten HSS

No	Mata Pelajaran	Kebutuhan Guru	Ketersediaan Guru	Kekurangan/kelebihan
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	25	33	Lebih
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	25	29	Lebih
3.	Bahasa Indonesia	37	55	Lebih
4.	Matematika	33	65	Lebih
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	33	60	Lebih
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	28	51	Lebih
7.	Bahasa Inggris	28	44	Lebih
8.	Seni Budaya	25	9	Kurang
9.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	25	25	Cukup
10.	Bimbingan Konseling (BK)	25	20	Kurang

Berdasarkan tabel 3 dapat diprediksi kebutuhan guru dengan asumsi bahwa setiap guru wajib mengajar 24 jam per minggu dan ketersediaan guru secara bersama untuk seluruh SMPN se kabupaten HSS dapat dilihat pada tabel 4.

Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di SMPN se-kabupaten HSS cenderung kelebihan guru terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris, tetapi sangat kekurangan guru Seni Budaya. Hanya guru Penjaskes yang jumlahnya mencukupi. Khusus untuk guru BK masih kekurangan dan beberapa sekolah ada yang memiliki lebih dari satu guru BK tetapi beberapa sekolah lainnya tidak memiliki guru BK.

Kekurangan dan kelebihan guru di Kabupaten HSS sebaiknya cepat diatasi karena akan berdampak pada profesionalisme guru.

Sesuai syarat keprofesionalitas, menurut Rahman & Amri (2014) guru harus mengajar sesuai bidangnya. Kekurangan atau kelebihan guru ini terjadi tidak merata. Kelebihan guru terjadi di pusat kota dan kekurangan guru terjadi di daerah pinggiran atau pedalaman. Untuk mengatasi masalah penyebaran guru, Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2003 memberikan terobosan berupa tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus. Adanya tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus dimasukkan untuk mendorong agar guru mau mengabdikan di daerah khusus. Selain itu, pemerintah harus segera melakukan pemerataan fasilitas yang memadai untuk para guru di daerah. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa guru lebih senang menetap di kota karena fasilitas yang lebih memadai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan secara keseluruhan jumlah guru untuk sembilan mata pelajaran (Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan Penjaskes) telah tercukupi, namun penyebarannya masih belum merata.

Saran

Disarankan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan BKD Kabupaten HSS agar segera merotasi guru-guru SMPN di sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru sesuai dengan peraturan bersama lima menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penelitian ini kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan dana selama kegiatan penelitian. Penelitian ini dibiayai dari dana BO-PTN tahun 2014.

DAFTAR RUJUKAN

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). *Research Methods in Education*. England: Taylor & Francis e-Library.
- Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses di Sekolah Menengah.
- Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013.
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Rahman, M & Sofan Amri. (2014). *Kode Etik Profesi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sofyan, A. (2011). *Pemetaan dan Analisis Kompetensi Siswa SMA Serta Alternatif Pemecahannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*. Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan).